

Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan Relevansinya dengan Rekonstruksi Pola Komunikasi Dakwah

M. Rodinal Khair Khasri

Universitas Gadjah Mada

m.rodinal.k@mail.ugm.ac.id

Bernard Selfry Yamaraja

Collective Academia

yamarajabernard@gmail.com

ABSTRACT

This study is qualitative research based on a literature review. It addresses the problem of relativism of truth and hegemonic patterns in da'wah communication. In response to this issue, using Gadamer's hermeneutic approach, this research aims to reconstruct the pattern of da'wah communication to moderate the tension between conservatism and progressivism. Moderation takes place at the hermeneutic level, referring to the process of communicators interpreting their reality and the reality of the recipients. This interpretation involves three important moments: 1) Bildung or cultural constellation shaping the interpreter's horizon and referring to the intellectual progress of both communicators and recipients, 2) historical influence as an existential moment for communicators and recipients, clarifying that dialogue must consider context, 3) fusion of horizons showing that there is no final understanding of everything. The most important thing is the endless process.

Keywords: Bildung, da'wah communication, hermeneutics, historical influence, horizon fusion, reconstruction.

Article Information:

Received (12 Januari 2024), Revised (10 Februari 2024), Published (29 Februari 2024)

A. PENDAHULUAN

Misi penyebaran pengetahuan dan nilai merupakan bagian penting yang sangat esensial dalam struktur institusional suatu agama. Salah satu nomenklatur yang relevan digunakan yaitu istilah *dakwah*. Menurut Yunus dalam Abdullah (Abdullah, 2019), secara etimologis, *dakwah* berasal dari bahasa Arab yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, dan mengundang. Misi dalam *dakwah* terikat oleh normativitas yang disepakati dan dijadikan kaidah umum dalam komunitas religi. Di dalam konteks Islam, *dakwah* adalah misi suci dan mulia, khususnya merujuk pada tata cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kaidah tersebut dilegitimasi melalui kitab suci dan pesan-pesan kenabian. Selain aspek legal-formal, proses *dakwah* juga harus mengacu pada ilmu. Artinya, siapapun yang tertarik untuk menjalankan misi *dakwah* memerlukan bekal pemahaman tentang aturan dan mekanisme *dakwah*. Pemahaman lainnya yang sangat krusial yaitu tentang etika dan estetika *dakwah* (Fatimah, 2019). *Dakwah* terdiri dari aktivitas menyebarkan, mengajak, dan menyampaikan pesan-pesan agama kepada orang lain dengan harapan akan terjadi pergeseran dan perubahan pandangan yang mengarah pada kebenaran dan kebaikan (Hendra & Hartati, 2019).

Misi *dakwah* bergulir secara dinamis di ranah sosial yang secara ontologis merupakan realitas yang tersusun atas pluralitas yang meliputi aspek fisik-materil (*tangible*) maupun aspek non-materiil (*intangible*). Dikarenakan menyangkut kepentingan yang cukup kompleks, bersifat kolektif dan multidimensional, misi *dakwah* seringkali menimbulkan friksi yang mengarah pada perpecahan. Perpecahan terjadi disebabkan oleh adanya persaingan dan bahkan pertarungan narasi yang disertai dengan monopoli atas kebenaran melalui klaim-klaim yang sifatnya fundamentalis (*truth-claim*) atas pengetahuan dan nilai yang diyakini sebagai paling benar. Sebagai contoh, muncul wacana yang bersifat politis seperti Kristenisasi dan Islamisasi. Keduanya memiliki makna yang cukup beragam. Namun, yang lebih dominan adalah makna negatif yang diasosiasikan dengan "misi terselubung." Baik Kristenisasi maupun Islamisasi dapat diartikan sebagai penyiaran agama secara umum (*propagation*) dan ajakan konversi (*conversion*). Pengertian yang pertama lebih luas, hanya bersifat persuasif, mengajak dan berbagi informasi—penyebarluasan ajaran— tanpa condong ke arah perpindahan agama.

Namun, arti yang kedua lebih sempit dan jelas. Ada momen perpindahan agama yang dijadikan sebagai tujuan utama (Djafar, 2014).

Merujuk pada motif aksiologisnya, *dakwah* ditujukan untuk mempersuasi, mengindoktrinasi, dan memberikan alternatif jalan lain kepada orang lain yang diasumsikan menyimpang dan bahkan berada di luar kebenaran. Pada level konatif, subjek yang melakukan komunikasi *dakwah* akan cenderung menjadikan objek atau lawan komunikasi sebagai sub-ordinat dan akan mengafirmasi kebenaran yang disampaikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sandhu dan Sohi, konasi atau tindakan konatif adalah tindakan yang bersifat personal, intensional, dan memiliki tujuan spesifik (*goal-oriented*) serta motivasional (Sandhu & Sohi, 2016). Disebut bersifat konatif karena subjek dalam komunikasi *dakwah* diarahkan pada suatu tujuan yang jelas, dengan kata lain sangat misionaris, disertai target yang bergulir dalam tegangan eksklusivitas-inklusivitas.

Jika aktivitas *dakwah* melulu diarahkan pada suatu tujuan yang sifatnya perpindahan (*conversion*), maka akan kontraproduktif dengan semangat harmonisasi kehidupan beragama, terlebih di Indonesia yang notabene tersusun atas pluralitas suku, etnis, agama, dan budaya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan rekonstruksi pola komunikasi *dakwah* ke arah yang lebih dialogis, tanpa harus menjadikan orang lain (objek *dakwah*) sebagai sub-ordinat doktrin dan dorongan dogmatis lainnya. Rekonstruksi ini ditujukan untuk membangun pola dialog lintas iman (*interfaith dialog*) yang kontekstual, substantif, dan dialogis yaitu mengedepankan prinsip egalitarianisme dan demokrasi. Tantangan terbesar dalam komunikasi *dakwah* adalah menjawab pertanyaan "Bagaimana cara agar esensi *dakwah* tetap ada, namun juga dapat mengakomodir proses dialogis yang dapat mengakomodir inklusivitas dan toleransi. Namun, perlu ditekankan bahwa inklusivitas yang dimaksud bukan dalam rangka mengafirmasi relativisme. Dengan kata lain, inklusivitas tidak ditujukan dalam rangka mendekonstruksi prinsip inti dalam suatu agama secara total, namun akan diarahkan pada suatu tujuan agar pola komunikasi lebih kontekstual, dapat mengakomodir ragam perspektif dan tidak mengarah pada hegemoni wacana. Adapun tujuan *dakwah* tetap akan diletakkan pada ruang yang tidak serta merta didekonstruksi, namun ketika sampai pada pola

komunikasi yang dialogis dan inklusif, ruang dialog akan menjadi terbuka. Jika terjadi ketidaksepahaman, akan tetap diapresiasi sebagai keberagaman wacana dan perspektif.

Proses rekonstruksi akan berjalan dengan bantuan pendekatan Hermeneutika Hans-Georg Gadamer, khususnya tentang konsep *Bildung*. Konsep *Bildung* memiliki ragam makna, namun secara historis memiliki korelasi yang kuat dengan konsep Socrates tentang *Soprosune* yang berarti "keugaharian." Menjadi ughari berarti dapat dengan jelas memahami kapasitas, batas, dan proses kehidupan yang sedang berjalan, termasuk setiap tindakan dan konsekuensinya di level individual maupun sosial. Di dalam konteks pemikiran Gadamer —yang juga relevan dengan pemikiran Wilhelm von Humboldt—, konsep *Bildung* dapat dipahami sebagai proses transformasi cara pandang seseorang tentang makna dalam perjumpaannya dengan orang lain (Bohlin, 2013). Proses transformasi inilah yang menjadi kata kunci penting dalam lingkaran hermeneutis yang ditawarkan oleh Gadamer, sekaligus juga menjadi puncak dari filsafat Gadamer. Selain *bildung*, terdapat poin pemikiran Gadamer lainnya yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam merekonstruksi pola komunikasi *dakwah*, yaitu keterpengaruhan sejarah dan fusi horizon. Artinya, setiap partisipan dalam proses komunikasi atau dialog *dakwah* pasti memiliki latarbelakang pengetahuan dan nilai yang diperoleh dari proses kesejarahannya, termasuk pengaruh pendidikan dan konstelasi budaya. Selain itu, sudut pandang subjek dalam komunikasi *dakwah* juga dipengaruhi oleh fusi horizon, yaitu proses bertemunya ragam horizon (pikiran, pengalaman, dan idealitas subjek).

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan mengandalkan sumber data dari studi kepustakaan. Fokus utama penelitian adalah epistemologi ketidakpastian, yang membahas sifat dan batasan pengetahuan, terutama dalam situasi ketidakpastian. Penelitian ini meneliti bagaimana pengetahuan dipahami dan diatur dalam konteks ketidakpastian, serta

mengeksplorasi relevansinya terhadap keyakinan agama. Analisis data mengikuti pola analisis Miles dan Huberman, yang melibatkan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penyimpulan data.

C. KAJIAN TEORI

Penekanan yang kuat pada ontologi pemahaman serta aspek pra-strukturasi pemahaman dalam bangunan hermeneutika dialektis Gadamer akan dapat digunakan sebagai jembatan teoretis (*bridge of theory*) di dalam upaya memoderasi semangat indoktrinasi, eksklusivisme, inklusivisme, toleransi, dan klaim kebenaran di dalam keberagamaan. Moderasi tersebut menjadi esensi dari proses rekonstruksi yang hendak dilakukan. Hermeneutika yang ditawarkan oleh Gadamer tergolong ke dalam Hermeneutika pasca Heidegger yang kental dengan nuansa ontologi dan menjadi antitesa Hermeneutika metodis mulai dari era Hermeneutika bibliotek sampai dengan historisisme.

Pembeda antara Gadamer dengan corak pemikiran hermeneutika mazhab historisisme seperti Dilthey adalah pada kritiknya tentang penggunaan dan peletakkan hermeneutika sebagai metode penafsiran. Jika hermeneutika diposisikan sebagai metode, maka kerja penafsir akan menjadi bercabang yaitu pada justifikasi kebenaran metodis dan ambisi untuk memperoleh kebenaran teks (*the truth of text*). Selain itu, meletakkan hermeneutika sebagai metode menjadi bermasalah karena horizon subjek penafsir yang meliputi pengetahuan dan pengalaman dalam rantai kesejarahan menjadi tereduksi ke dalam kungkungan normativitas metode.

Jika mengacu pada objektivitas kebenaran teks, Hermeneutika biblikal/teologis sudah memulai jauh lebih dulu dan memang didorong oleh motif sakralitas dan absolutisme khas teologi. Kebenaran diyakini sebagai bagian yang tidak terpisah dari teks. Meskipun memang terdapat keyakinan lain yang meneguhkan teks-teks kanon sebagai bagian yang tak terpisahkan—secara kebenaran—dari teks primer. Objektivitas kebenaran dalam konteks Hermeneutika Gadamer tidak

mengacu pada suatu ruang atau struktur epistemik tertentu yang "menggaransi" ketercapaian kebenaran penafsiran. Kebenaran penafsiran selalu bergulir secara cair dalam ruang kesejarahan subjek yang dinamis. Maka dari itu, normativitas metode dalam bentuk apapun tidak bisa menjamin seorang penafsir dapat mencapai kebenaran teks karena pada dasarnya "kebenaran teks" pun adalah suatu hal yang paradoks. Sebagai contoh, keyakinan akan suatu kebenaran penafsiran karena ditafsirkan oleh tokoh intelektual yang "dipercaya" banyak orang (baca: kredibel) menjadi paradoks karena penafsir tersebut juga pada dasarnya merupakan penafsir atas hasil tafsiran orang lain. Bagaimana jika si penafsir langsung berhadapan dengan teks primer? Tentu kasusnya akan sama, karena meskipun penafsir tersebut langsung menganalisa dan menafsir teks primer, namun proses penafsirannya bergulir dalam keterpengaruhan sejarah dan fusi horizon. Terkait fusi horizon, penafsir tentu menjadikan horizon (pikiran, pengalaman, testimoni) penafsir lain sebagai pembanding tafsirannya. Proses komparasi ini sangat membantu di dalam meneguhkan keyakinan pada kebenaran hasil penafsiran.

Dalam konteks diskusi pemikiran filsafat masa kini, hermeneutika filsafati menjadi sangat penting karena tidak hanya mengatasi wilayah empiris atau analitis semata, tetapi juga menghadirkan pandangan holistik tentang realitas manusia. Hermeneutika mengakomodasi seluruh spektrum pengalaman manusia, menawarkan wawasan yang melampaui pandangan atomistik, objektivistik, dan subjektivistik. Dengan pendekatan historikal-diakroniknya, hermeneutika menghasilkan pemahaman konkret yang tidak terpaku pada abstraksi, dan tidak terjebak dalam operasionalisme yang membatasi cara bertindak. Melalui hermeneutika filsafati, semakin banyak pemikir modern yang menyadari pentingnya kontekstualitas dalam pencarian kebenaran (Poespoprodjo, 2004).

Berikut adalah komponen penting dalam pemikiran Hermeneutika Gadamer.

1. Bildung

Bildung dalam bahasa Jerman merujuk pada proses pembentukan kebudayaan yang melibatkan interaksi antara berbagai unsur yang membentuk suatu formasi kebudayaan. Secara alternatif, bildung dapat diinterpretasikan sebagai kombinasi pendidikan dan kebudayaan yang mempengaruhi perkembangan dan transformasi individu, menyoroti bagaimana individu tumbuh, berkembang, dan berubah.

Gadamer (Gadamer, 2004a) menjelaskan bahwa konsep Bildung menunjukkan perubahan intelektual yang mendalam. Pertama, penting untuk memperhatikan bahwa Bildung awalnya terkait dengan ide bentuk alami atau "natural form" yang mencakup penampilan fisik dan bentuk-bentuk alami lainnya seperti formasi pegunungan. Namun, kemudian Bildung terhubung erat dengan proses budaya dan menyoroti upaya manusia untuk memahami dan mengembangkan potensi intelektual serta kemampuan berpikirnya sebagai subjek.

Subjek ditandai oleh keterpisahannya dari yang bersifat langsung dan alami, menunjukkan aspek intelektual dan rasional dari sifat alamiahnya. Dalam konteks ini, subjek tidak sepenuhnya ditentukan oleh kondisi alaminya dan oleh karena itu membutuhkan proses Bildung. Hegel memandang Bildung sebagai proses universal yang terkait dengan pengalaman hidup dan pemahaman subjek tentang dirinya sendiri. Universalitas dalam konsep Hegel tentang Bildung tidak terbatas oleh teori-teori tetapi mencakup esensi rasionalitas subjek secara keseluruhan. Bildung sebagai proses universalisasi merupakan tugas subjek untuk mengesampingkan partikularitasnya demi mencapai universalitas. Namun, Gadamer mengkritik pendekatan ini karena menganggapnya menekan hasrat subjek. Oleh karena itu, tuntutan untuk membebaskan diri dari kondisi sebagai objek hasrat dan mencapai objektivitas merupakan tantangan yang kompleks bagi subjek (Gadamer, 2004).

2. Keterpengaruhan Sejarah (Wirkungsgeschichte)

Subjek, siapapun dia, dia adalah produk dari konteksnya sendiri, konteks kesejarahan (lahir dari tradisi yang telah ada sebelumnya). Subjek tidak dapat mengabaikan peran sejarah dalam membentuk horizonnya. Gadamer dengan jelas

mengadopsi konsep Heidegger tentang prastruktur pemahaman dan keterlemparan kesejarahan yang inheren di dalam cara manusia mengada (*mode of existence*). Subjek terlempar dan basah kuyup dengan kesejarahan yang tidak mungkin dapat ia tolak. Menurut pandangan Heidegger tentang prastruktur pemahaman, subjek dalam memahami suatu teks, situasi, atau keadaan, tidaklah memulainya dengan pikiran yang kosong yang kemudian diisi oleh konteks saat ini. Sebaliknya, subjek membawa pemahamannya ke dalam situasi tersebut, membawa maksud utama ke dalam konteksnya, dengan pandangan yang telah terbentuk sebelumnya, dan dengan prakonsepsi tertentu (Palmer, 2005).

Gadamer dalam hermeneutikanya menegaskan bahwa masa lalu tidak hanya merupakan kumpulan fakta yang menjadi fokus kesadaran, tetapi lebih sebagai aliran di mana subjek terlibat dan berperan dalam setiap proses pemahaman. Dengan demikian, di dalam membentuk pemahaman, tradisi tidak dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari subjek, melainkan sebagai konteks di mana subjek ada dan berinteraksi; tradisi ini seperti menjadi sangat jelas sebagai perantara yang seolah-olah tidak terlihat dalam kehidupan subjek—seperti ikan yang tidak menyadari sekelilingnya adalah air. Bagi Heidegger dan Gadamer, bahasa, sejarah, dan keberadaan tidak hanya saling berkaitan, tetapi juga menyatu, karena bahasa merupakan rumah bagi subjek yang eksis dan berkesadaran (Palmer, 2005).

D. PEMBAHASAN

1. Refleksi Kritis atas Pola Komunikasi Dakwah

Tantangan terbesar dalam komunikasi *dakwah* adalah pada sikap eksklusif dan terlalu mengarahkan tujuan pada perpindahan keyakinan. Di samping itu, pola komunikasi yang tidak kontekstual dan tidak dialogis juga semakin memperkuat nuansa eksklusivisme maupun fundamentalisme. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Eka Wigianti (2019), terdapat beberapa permasalahan yang mengindikasikan pola komunikasi *dakwah* yang tidak dialogis.

a) *Uzlah* atau *Tafarrud*

Da'i atau subjek *dakwah* yang tidak memikirkan dampak dalam jangka panjang terhadap apa yang telah disampaikan. Dengan kata lain, memilih melakukan *dakwah* hanya sebatas sebagai kegiatan rutin dan tidak peduli dengan dampak pesan yang disampaikan.

b) *Ittibaa'ul-hawa*

Seorang da'i menyampaikan sesuatu cenderung menyesuaikan dengan hal yang disukai, tanpa melibatkan jalan pikiran yang rasional.

c) *'Adamut-Tatsabbut Aw At-Tabayyun*

Sikap terburu-buru, tidak teliti, dan pemahaman yang dangkal. Dengan kata lain, hanya mengedepankan retorika.

d) *Faudhal Waqti*

Alur berpikir dan penyampaian pesan yang tidak terstruktur dan tidak runtut. Indikator lainnya yaitu mencampur ragam perkara dan di dalam penyampaian materi tidak memperhatikan konteks sosial.

Keempat contoh di atas merupakan bentuk dari pola komunikasi *dakwah* yang tidak dialogis. Adapun acuan mendasar yang umum berlaku dalam praktek *dakwah* adalah norma-norma agama yang bersumber pada kitab suci dan sabda Nabi. Di dalam teologi Islam, keduanya adalah sumber utama praktek keagamaan. Jika suatu ajaran secara metodis korespondensif dengan redaksi tekstual kitab suci dan tradisi suci kenabian, maka akan diyakini sebagai ajaran yang benar. Sebaliknya, jika syarat korespondensi tidak mencukupi, maka akan dinilai sebagai ajaran yang mengada-ada (*bid'ah*) atau bahkan ajaran sesat yang secara total menyimpang.

Jika mengacu pada ide tentang "penyimpangan", maka pasti ada suatu acuan yang terstandarisasi melalui otoritas tafsiran. Namun, otoritas tafsiran merupakan hasil tafsir dari otoritas penafsir yang pada dasarnya tidak pernah luput dari subjektivitas yang secara filosofis merupakan konsekuensi eksistensial seorang penafsir. Pada poin inilah letak tantangan sekaligus kesulitan saat menyikapi standarisasi kebenaran penafsiran secara absolutis.

Merujuk pada pendekatan Gadamerian, sikap absolutis atas standar kebenaran yang terkandung dalam perangkat metode penafsiran merupakan suatu sikap yang justru mereduksi potensi manusia sebagai subjek yang mampu berpikir multidimensi, berkesadaran, dan menyejarah. Mengabsolutkan suatu metode penafsiran akan membatasi ruang gerak penafsir. Potensi "pelampauan diri" yang sebetulnya merupakan konsekuensi kesejarahan dan juga sebagai modus eksistensial seharusnya mengatasi normativitas metode.

Normativitas metode tidak lain adalah konsekuensi dari potensi "pelampauan diri." Itu menunjukkan bahwa metode beserta sekelumit normativitasnya adalah produk subjektivitas manusia. Normativitas metode bukanlah objek natural (*brute facts*) sebagaimana oksigen, hidrogen, dan senyawa lainnya yang secara objektif ada di alam tanpa melibatkan subjektivitas manusia. Normativitas adalah hasil kreasi subjektivitas manusia karena diproduksi melalui konsensus di level sosial. Namun, dalam konteks teologis, normativitas menjadi sangat esensial karena kebenaran selalu disertai dengan keyakinan agama (*religious belief*) yang dalam kondisi tertentu tidak berkompromi dengan wacana perubahan dan pembaharuan. Hal ini biasa disebut sebagai puritanisme. Pada konteks Islam, ideologi puritan direpresentasikan oleh gerakan Salafi atau Wahhabisme (Pratama, 2019) yang tidak menerima adanya kreasi-kreasi baru dalam hal ritus keagamaan dan tidak setuju dengan kompromi antara ajaran agama dengan tradisionalitas yang dianggap bukan bagian agama.

Mengenai problem primordial misi penyebaran ajaran agama, penting menyinggung konservatisme dan progresivisme. Konservatisme meyakini bahwa ada nilai yang bersifat final dan tidak berubah, bersifat sakral, dan dengan demikian harus dilestarikan. Hal itu berhubungan erat dengan pandangan esensialisme. Status quo juga merupakan hal yang khas dari konservatisme. Berlawanan dengan itu, progresivisme mengedepankan proses yang kontekstual dan dapat mengakomodir problem terkini baik di level sosial, politik, maupun kultural.

Progresivisme sangat dekat dengan semangat revisionisme, dekonstruksionisme, dan sekularisme. Namun, tentu ada juga progresivisme yang berkompromi dengan esensialisme. Kompromi berlangsung dengan memilah

domain kerja, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan misionaris. Jika konten misi penyebaran adalah hal yang tidak bersifat inti—seperti hubungan sosial keumatan (*muammalah*) — maka dimensi fungsional dan pragmatis dapat menjadi etos prioritas dalam membangun orientasi *dakwah*, terutama pada konstruksi pola komunikasinya. Namun, jika berhubungan dengan konten yang sudah menjadi ketetapan mutlak seperti akidah, maka diperlukan sikap yang lebih memprioritaskan konservasi.

Perlu juga diperhatikan, bahwa menjadi murni konservatif dan murni progresif merupakan suatu hal yang naif. Sikap epistemik atas suatu objek, tidak pernah bersifat singular. Pasti akan melibatkan pluralitas ide yang tercermin dalam semesta probabilitas, termasuk dalam hal keyakinan atas suatu kebenaran, baik dalam konteks hermeneutika, semantik, maupun retorika.

2. Manusia sebagai Subjek yang Berpikir dan Berkesadaran

Sejak era Yunani Kuno, terutama pada masa Sokrates dan setelahnya, diskusi filsafat tentang sifat pengetahuan—yang kemudian dikenal sebagai epistemologi—selalu fokus pada upaya memahami esensi pengetahuan. Selanjutnya, pusat perhatiannya bergeser ke pertanyaan tentang "Bagaimana mencapai pengetahuan yang benar mengenai suatu hal?", dan "Apa implikasinya terhadap "keberadaan" manusia sebagai subjek yang berpikir? Perdebatan ini menjadi semakin matang seiring dengan munculnya zaman modern yang ditandai oleh dominasi rasionalisme yang kuat. René Descartes, tokoh sentral dalam periode ini, dianggap tak terpisahkan dari zaman modern karena kontribusi pemikirannya yang sangat penting bagi perkembangan rasionalisme. Konsepnya tentang subjek yang berpikir, terutama yang dirumuskan dalam karyanya "*Discours de la méthode*" dan "*Meditationes de prima Philosophia*", menyoroti gagasan tentang "*cogito*" yang oleh Descartes dianggap sebagai inti dari pengetahuan itu sendiri, atau pengetahuan yang pasti. Meskipun telah mengalami berbagai modifikasi, terutama dalam konfrontasinya dengan aliran empirisme, status manusia sebagai subjek yang berpikir tetap menjadi fokus diskusi yang relevan hingga saat ini. Meskipun Immanuel Kant dalam kritisismenya berusaha mencapai keselarasan antara

empirisme dan rasionalisme, diskusi tentang subjek yang berpikir tetap berlanjut. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika perdebatan ini dianggap sebagai perdebatan yang abadi dan terus menerus terbuka untuk penelitian lebih lanjut.

Sebagai contoh, Platon dengan konsepnya tentang keugaharian (*sophrosune*)—sebuah konsep yang ia serap dari dialog-dialog Socrates—cocok untuk menggambarkan posisi sentral manusia di dalam kehidupannya, terlebih pada tataran kosmologis, manusia merupakan mikrokosmos yang berhubungan langsung dengan makrokosmos (alam semesta). Konsep tersebut merupakan konsep yang didapat dari dialog Socrates dengan Xarmides, di mana *sophrosune* merupakan salah satu dari empat keutamaan pokok (*cardinal virtues*) yang dikenal dalam tradisi filsafat klasik (Wibowo, 2018). Mengenai dialog antara Socrates dengan Xarmides, Platon lebih konsisten menggunakan padanan “pengenalan diri” dari pada “pengendalian diri.” Hal ini dikarenakan “pengenalan diri” terkait dengan kesadaran eksistensial manusia yang menyentuh taraf ontologis, mengenai manusia “aku” sebagai pengada yang berpikir. Tentu saja pembahasannya menjadi sangat banyak, dari sepinggal Platon sampai sekarang ini.

Bertitik tolak pada hermeneutika dialektis Hans-Georg Gadamer, proses memahami (aktivitas hermeneutis) merupakan cara manusia berada. Artinya, konsep “Aku” menjadi sangat sentral. Hal ini merupakan konsekuensi dari kritikan Gadamer terhadap metode, yang kemudian menjadikan hermeneutikanya bukan sebagai metode mencapai kebenaran, melainkan sebagai filsafat itu sendiri.

Bertitik tolak dari pijakan ontologis manusia dengan sejarah sebagai jangkar faktisitasnya, maka ada aspek penting yang mengindikasikan keberadaan manusia sebagai “subjek yang berpikir” di dalam realitas sosialnya yaitu aspek budaya. Budaya merupakan implikasi dari potensi manusia sebagai “subjek yang berpikir” serta modus eksistensialnya sebagai “pengada”. Maka dari itu, “Aku” sebagai “pengada” bisa dilihat dari persinggungannya dengan budaya yang kemudian mengarahkan pada suatu kondisi “Aku di dalam budaya”—meminjam istilah Toety Heraty (Noerhadi, 2013), budaya merupakan bentuk dari “Aku” dalam sebuah dunia bersama, dan di dalam budayalah “Aku” selalu memproses dan memperbaharui pemahamannya. Hal ini korelatif dengan tesis Gadamer tentang

hermeneutika sebagai cara manusia berada sehingga pemahaman itu tidaklah statis karena pemahaman manusia, selain terikat oleh *Bildung* (formasi budaya), juga terikat oleh sejarah dan peleburan horizon yang juga merupakan konsekuensi dari kesadarannya akan sejarah. “Aku” di dalam kesadaran sejarahnya menemukan dirinya pada konteks kekinian sebagai dialog dengan “Aku” di masa lalu, dan tentunya dengan “Aku” yang lain. Oleh sebab itu tidak ada pemahaman yang didapat tanpa proses dialog dengan “Aku” yang lain.

3. Rekonstruksi Pola Komunikasi Dakwah

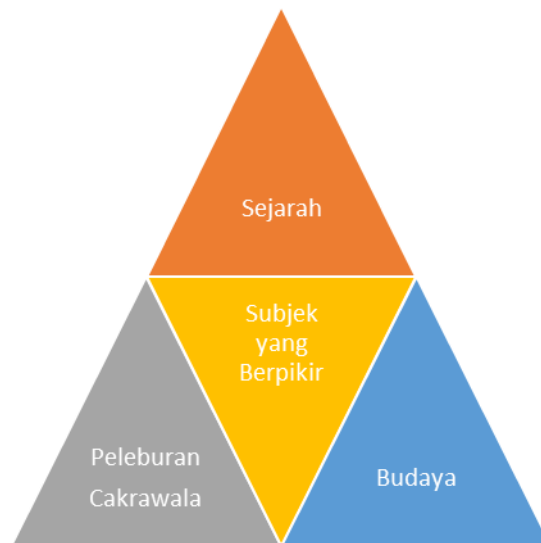
Merefleksikan penjelasan sebelumnya, proses rekonstruksi pola komunikasi *dakwah* dimulai dari penekanan pada keterbukaan dialog yang sifatnya intersubjektif. Di samping pendekatan hermeneutika Gadamer, rekonstruksi ini akan melibatkan bantuan pendekatan psikoanalisa Jacques Lacan. Perspektif Lacan berfungsi untuk memperjelas sekaligus merasionalisasikan fenomena kesepahaman dan ketidaksepahaman dalam proses komunikasi *dakwah* khususnya di level psikis subjek (Aku) yang berdialog dengan yang lain (*the others*). Dengan demikian, nantinya pola komunikasi di level psikis akan menjadi jelas. Analisa di level psikis merupakan layer *pertama* dalam proses rekonstruksi. Analisa di level psikis berfungsi sebagai pendasaran yang berkorelasi dengan proses peleburan cakrawala (fusi horizon) di layer *kedua* yaitu analisa menggunakan hermeneutika Gadamer.

Psikoanalisa atau psikologi mendalam (“deep psychology”) adalah cabang Psikologi yang diciptakan oleh Sigmund Freud. Jacques Lacan menyempurnakannya dengan beberapa analisa yang bersifat radikal. Kesepahaman dan ketidaksepahaman dalam perspektif Psikoanalisa Lacan dipahami sebagai dialektika identitas yang tersubversikan (Lacan, 1966). Di dalam hermeneutika Gadamer, peleburan horizon melibatkan aktivitas “saling menghegemoni” sebagai konsekuensi eksistensial subjek dan memiliki kecenderungan untuk menjadikan subjek lain sebagai objek yang hendak dikuasai. Hal ini relevan dengan ketidakadilan hermeneutik (*hermeneutical injustice*), yang bergulir secara kultivatif dalam pola komunikasi *dakwah* yang tidak dialogis. Pola inilah yang menjadi pijakan rekonstruksi pada pembahasan ini.

Konsep "*I-Thou*" Gadamer dalam Psikoanalisa Lacan dibaca sebagai dialektika antara "*I*" ("Aku") dan "Yang lain" ("*Autre*" / "*Other*"). "*I*" ("Aku") dan "Yang lain" ("*Autre*" / "*Other*") diandaikan sebagai struktur yang mirip bahasa ("*language-like*") sehingga "*dakwah*" dapat dianggap sebagai dialektika antara "*I*" ("Aku") dan "Yang lain" ("*Autre*" / "*Other*") dalam bentuk tarung bahasa, baik itu bahasa verbal (*oral*) maupun tulis. Adapun kesepahaman diperlihatkan dengan tutur kata yang menandakan persetujuan, sedangkan ketidaksepahaman diperlihatkan dengan tutur kata yang menandakan penolakan.

Ajakan konversi dalam "*dakwah*" merupakan sebuah "*hermeneutical injustice*" karena yang terjadi bukanlah sebuah dialog sebagai kenyataan komunikasi, melainkan monolog. Oleh karena itu, dibutuhkan dialog lintas iman ("*interfaith dialogue*") yang mengedepankan prinsip inter-dependensi yaitu prinsip yang dapat memperjelas domain terjadinya inklusivitas dan eksklusivitas. Dengan kata lain memperjelas area kesepahaman dan area ketidaksepahaman, serta area kesepakatan dan ketidaksepahaman. Oleh sebab itu, tujuan dialog lintas iman adalah merealisasikan terjadinya komunikasi yang bermakna (*fruitfull*) antara "*I*" (Pendakwah) dan "Yang Lain" (yang didakwah). Adapun kesepahaman dapat dibaca sebagai ketundukan yang didakwahi sebagai "*Moi*" (Milikku) bagi pendakwah ("*I*", "Aku") dan ketidaksepahaman dapat dibaca sebagai penolakan akuisisi diri ("*Moi*", Milikku) terhadap pengakuisisi ("*I*", "Aku"). Selanjutnya, "Kenapa di dalam komunikasi ada kesepahaman sekaligus ketidaksepahaman?" Alasannya yaitu karena ada dialektika antara "*I*" dan "*Moi*" di pihak "*I*" dan "*Autre*."

Di *layer* kedua, rekonstruksi pola dialog *dakwah* akan dijelaskan melalui dua skema berikut:

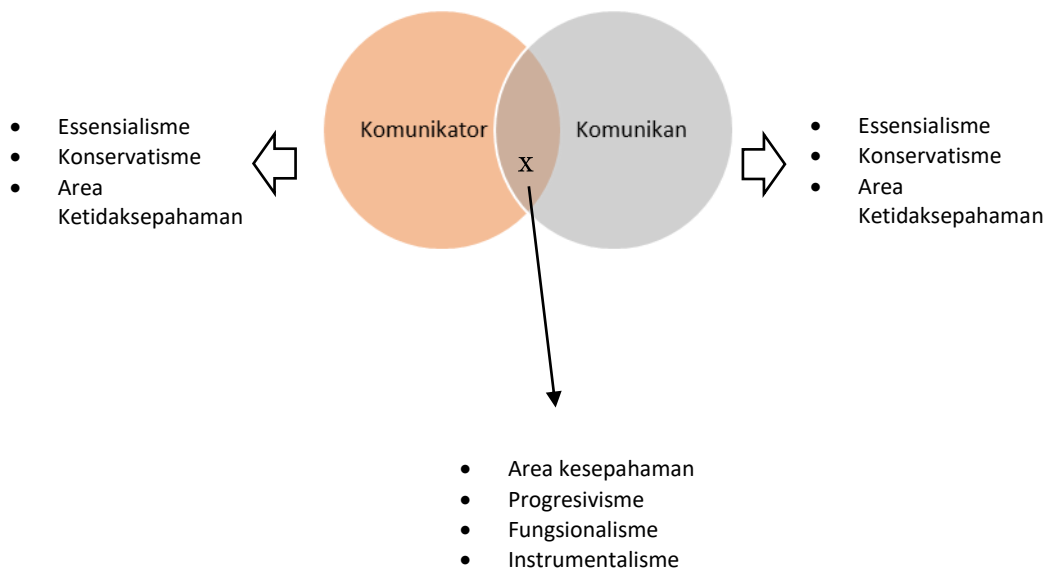


Skema 1. Piramida Subjek yang Berpikir

Pada skema 1, dijelaskan bahwa subjek sebagai aktor utama dalam proses komunikasi tidak pernah terbebas dari keterpengaruhan sejarah. Wacana ketuhanan dalam bentuk apapun selalu bergulir dalam kesejarahan. Keterbukaan atas wacana lain, terutama yang bersifat tandingan disebabkan karena subjek menghindar atau bahkan menutup ruang dialog dengan cakrawala/ horizon yang lain (*the others*). Konsekuensinya, komunikasi akan menjadi satu arah dan kemudian menjadikan lawab bicara sebagai sub-ordinat pikiran dan kesadaran. Di dalam posisi sebagai sub-ordinat, lawan bicara akan diasumsikan tak lebih dari sekadar objek pasif yang hanya menerima pesan dan pada akhirnya menjadi objek yang hendak dibentuk sedemikian rupa. Subjek sebagai komunikator seharusnya tidak memposisikan komunikan sebagai objek yang hendak dibentuk. Komunikan juga sejatinya merupakan subjek aktif yang memiliki kekayaan horizon.

Pada layer berikutnya, perlu ada pembagian domain dalam proses komunikasi. Hal ini guna memoderasi dan memperjelas domain kesepahaman dan ketidaksepahaman. Pembagian domain ini juga ditujukan untuk memperbesar kemungkinan berlangsungnya proses komunikasi yang dialogis, di mana penghargaan atas ragam perspektif dan ragam preferensi—khususnya iman/

religious belief— dapat terealisasi secara berkelanjutan. Skema berikut akan menjelaskan tentang konstruksi komunikasi *dakwah* yang dialogis.



Skema 2. Konstruksi Komunikasi Dialogis

Merujuk pada skema di atas, irisan (x) adalah domain yang memungkinkan terjadinya dialog yang progresif dengan mempertimbangkan aspek fungsionalitas dan instrumentalitas dialog. Kesepahaman yang terjadi di dalam domain ini tidak dapat dipahami sebagai yang samasekali terlepas dari konteks ketidaksepahaman. Kesepahaman didahului oleh pemahaman dan kesadaran tentang poin-poin perbedaan mendasar yang tidak mungkin didekati dengan pendekatan fungsionalisme dan instrumentalisme. Sebagai contoh, inti keimanan (*core of faith*) yang ditopang oleh komitmen ontologis tidak dapat disamakan dengan inti keimanan lainnya, seperti menyamakan secara total antara Islam dan Kristen. Pada dasarnya, keduanya memiliki perbedaan fundamental pada cara keduanya di dalam memahami realitas ketuhanan. Pada model komunikasi yang dialogis, perbedaan

fundamental ini merupakan pijakan untuk menentukan arah dialog yang berada di domain kesepahaman dan pada akhirnya dapat merealisasikan kesepakatan bersama. Adapun domain di luar irisan (x) merupakan domain di mana masing-masing horizon (komunikator dan komunikan) memiliki beragam konten yang disikapi secara konservatif dan essensialis. Artinya, baik komunikator maupun komunikan sama-sama membangun sekat. Selanjutnya, ruang-ruang yang didemarkasi akan tetap eksis namun tidak secara soliter, karena keberadaan keduanya bergantung pada kesadaran koeksistensi. Sederhananya, semakin tinggi pemahaman komunikator terhadap konten di luar x (non-x) pada domain horizon komunikan, maka peluang domain x akan semakin besar. Dalam rangka untuk sampai pada suatu kesepahaman dan kesepakatan mutualisme, diperlukan pemahaman tentang poin-poin yang dinilai berbeda dan menjadi objek ketidaksepahaman dan ketidaksepakatan.

Jika dikontekstualisasikan ke dalam pola komunikasi dakwah dalam semangat pluralisme agama yang saling menghormati (pluralisme-dialogis), maka terdapat poin-poin yang perlu diperhatikan:

Pertama, Komunikasi yang dialogis akan terjadi jika dan hanya jika komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pemahaman yang kuat tentang diri masing-masing dan memiliki pemahaman tentang domain di luar dirinya. Dengan kata lain, komunikator memahami komunikan, dan sebaliknya, komunikan juga memahami komunikator.

Kedua, Membuka ruang dialog selebar-lebarnya, terutama dalam hal merespon permasalahan bersama (common problem), ancaman bersama (common threat) dan tujuan bersama (common goals) di level sosial, politik, dan kultural

Ketiga, Mengedepankan estetika dalam beretorika. Artinya, retorika yang terjadi dalam proses dakwah tidak bersifat kering, atau hanya mengedepankan prinsip formalisme, sehingga menjadikan lawan dialog sebagai sub-ordinat yang hendak dibentuk. Contoh sub-ordinasi berbasis formalisme adalah pada praktek dakwah atau misionaris lainnya yang bertujuan merealisasikan terjadinya perpindahan iman atau pindah agama.

Keempat, Menghormati keunikan masing-masing agama, dengan tetap menghormati keberadaan ritus-ritus penyembahan, pengetahuan yang khas dalam suatu agama, dan ragam semantik ketuhanan yang berbeda-beda di setiap agama.

E. KESIMPULAN

Merujuk pada pendekatan hermeneutika Gadamer, komunikasi *dakwah* akan menjadi dialogis jika komunikator dan komunikan dipertemukan dalam lingkaran hermeneutis yang mengakomodir kesejarahan subjek, adanya keterbukaan untuk berdialog, dan menyadari bahwa di samping kesepahaman ada ketidaksepahaman.

Rekonstruksi pola komunikasi *dakwah* dalam artikel ini merupakan respon atas polarisasi antara kutub konservatisme dan progresivisme. Dialog yang berlangsung dalam prinsip interdependensi merupakan ciri khas dari pola komunikasi yang ditawarkan di dalam artikel ini. Prinsip interdependensi merupakan elaborasi dari kejelasan ruang dalam proses dialog, khususnya dalam konteks dialog lintas iman (*interfaith dialogue*). Kejelasan ruang yang dimaksud adalah ruang dialog yang tidak mengarah pada relativisme, dapat mengakomodir etos progresivisme, dan tetap menghargai bagian yang tidak mungkin untuk dikompromikan, seperti doktrin inti dalam suatu agama. Dengan demikian, pola komunikasi yang terjalin antara pendakwah dan objek dakwah tidak melulu dalam konteks yang hegemonistik, melainkan dialogis.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Q. (2019). *Pengantar Ilmu Dakwah*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Bohlin, H. (2013). Bildung and intercultural understanding. *Intercultural Education*. <https://doi.org/10.1080/14675986.2013.826019>
- Djafar, A. M. (2014). Islamisasi dan Kristenisasi: Isu-isu krusial di Seputar Proselitisme dan Hak Kebebasan Beragama. *Jurnal HAM*, 11.
- Fatihah, S. R. (2019). KONSEP ETIKA DALAM DAKWAH. *Jurnal Ilmu Dakwah*. <https://doi.org/10.21580/jid.v38.2.3886>
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and Method* (J. Weinsheimer & G. Marshall, Donald (trans.)). Continuum.

- Hendra, T., & Hartati, S. (2019). Etika Dakwah Ditinjau dari Perspektif Psikologi Komunikasi. *AL MUNIR : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*. <https://doi.org/10.15548/amj-kpi.v2i2.491>
- Lacan, J. (1966). *Ecrits*. Routledge Classics.
- Noerhadi, T. H. (2013). *Aku dalam Budaya: Telaah Metodologi Filsafat Budaya*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Palmer, R. E. (2005). *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi* (M. H. & D. Muhammed (trans.)). Pustaka Pelajar.
- Poespoprodjo. (2004). *Hermeneutika*. CV Pustaka Setia.
- Pratama, A. R. (2019). Ideologi Puritan dalam Tafsir Jawa Pesisir: Kajian Terhadap Penafsiran Misbah Mustofa. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 9(2).
- Sandhu, B. S., & Sohi, K. K. (2016). Conation and Creativity. *International Journal of Research in Social Science*.
- Wibowo, S. (2018). *Platon: Xarmides (Tentang Keugaharian)*. PT Kanisius.
- Wigianti, E. (2019). Kegagalan dalam Berdakwah (Kajian Teoritis Dalam Buku Penyebab Gagalnya Dakwah Karya Dr. Sayyid M. Nuh). *Jurnal An-Nida*, 11(1).